

IMPLEMENTASI SISTEM *E-MONEV* DALAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH DI BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN

M. Rafi¹, Muhammad Faisal Firmansyah², Yulia Okeu³, Tatan Rustandi⁴, Aditia⁵, Lutfi Mahardika⁶, Widia Novita Lukitasari. WA⁷

*Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik, Universitas Lampung
rapiioppo957@gmail.com, widianovita2511@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem *e-Monev* dalam mendukung proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah di Bappeda Provinsi Sumatera Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem *e-Monev* mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas *monitoring* pembangunan daerah. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, integrasi data antar perangkat daerah, serta optimalisasi penggunaan teknologi, diperlukan penguatan kapasitas aparatur dan pengembangan sistem informasi yang terintegrasi guna meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan daerah.

Kata kunci: *e-Monev*, Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Pembangunan Daerah

A. PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses ini melibatkan perencanaan yang matang, pelaksanaan program yang terarah, serta evaluasi yang berkesinambungan. Setiap tahapan pembangunan harus disusun berdasarkan kebutuhan dan potensi daerah agar hasil yang dicapai lebih optimal. Selain itu, pembangunan daerah juga menuntut adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program pembangunan dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Melalui pendekatan yang terstruktur, pembangunan diharapkan mampu mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan daerah menjadi kunci dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan.

Pada pelaksanaannya, diperlukan suatu sistem yang mampu mengintegrasikan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi secara efektif dan efisien. Sistem tersebut berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya integrasi, proses perencanaan dapat didukung oleh data hasil pengendalian dan evaluasi sebelumnya. Hal ini memungkinkan terjadinya kesinambungan dalam siklus pembangunan daerah. Selain itu, sistem yang terintegrasi juga mempermudah koordinasi antar perangkat daerah dalam melaksanakan program pembangunan. Efisiensi waktu dan penggunaan sumber daya dapat lebih terjaga melalui pengelolaan informasi yang terpadu.¹

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pemerintah daerah mulai mengadopsi sistem elektronik *monitoring* dan evaluasi (*e-Monev*) sebagai bagian dari implementasi *e-government*. Penerapan sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pembangunan daerah. Melalui *e-Monev*, proses pemantauan dan evaluasi program dapat dilakukan secara digital dan terintegrasi. Hal ini memungkinkan penyajian data yang lebih cepat, akurat, dan mudah diakses oleh pihak terkait.

¹ Mudrajat Kuncoro, *Perencanaan Pembangunan Daerah: Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 23.

Selain itu, penggunaan teknologi informasi juga mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sistem *e-Monev* membantu pemerintah dalam mengidentifikasi capaian kinerja serta permasalahan yang terjadi di lapangan. Pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih tepat dan berbasis data.

Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pembangunan melalui pemanfaatan teknologi digital. Melalui dukungan teknologi informasi, proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk memperoleh informasi yang relevan dalam waktu yang tepat. Selain itu, penggunaan sistem digital juga membantu meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan data pembangunan. Sistem ini mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Kualitas pengambilan keputusan menjadi lebih baik karena didasarkan pada data yang valid. Pemanfaatan teknologi digital mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembangunan daerah.²

Data hasil *monitoring* dan evaluasi dalam perencanaan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Informasi yang diperoleh dari proses tersebut memberikan gambaran yang jelas mengenai capaian program serta berbagai permasalahan yang dihadapi di lapangan. Dengan adanya data yang akurat, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penggunaan data juga membantu dalam menentukan prioritas pembangunan secara lebih objektif. Perencanaan yang berbasis data akan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berorientasi pada hasil. Hal ini juga mendorong efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang tersedia. Kebijakan yang disusun menjadi lebih efektif dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah.³

² Richardus Eko Indrajit, *Electronic Government* (Yogyakarta: Andi, 2016), hlm. 45.

³ William N. Dunn, *Public Policy Analysis* (New York: Routledge, 2018), hlm. 98.

Bappeda Provinsi Sumatera Selatan memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan perencanaan pembangunan daerah. Bappeda Provinsi Sumatera Selatan bertanggung jawab dalam menyusun, mengintegrasikan, serta mengendalikan arah kebijakan pembangunan agar selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah. Implementasi *e-Monev* menjadi instrumen penting dalam mendukung penyusunan dokumen perencanaan seperti RKPD dan RPD. Melalui sistem ini, data capaian kinerja dan hasil evaluasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, *e-Monev* juga membantu meningkatkan kualitas perencanaan dengan menyediakan informasi yang akurat dan terintegrasi. Peran ini menjadikan Bappeda sebagai pusat koordinasi dalam memastikan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Proses pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.⁴

Tabel 1. Data Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (*e-Monev*)

N o	Perangk at Daerah	Program/Kegia tan	Pagu Anggaran (Rp)	Targ et (%)	Realisa si Fisik (%)	Realisas i Keuang an (%)	Keterang an
1	Dinas PUPR	Pembangunan Jalan	10.000.000.000	100	85	80	Dalam proses
2	Dinas Kesehatan	Pengadaan Alkes	5.000.000.000	100	90	88	Hampir selesai
3	Dinas Pendidikan	Rehabilitasi Sekolah	7.500.000.000	100	75	70	Perlu percepatan
4	Dinas Pertanian	Program Ketahanan Pangan	3.000.000.000	100	95	92	Sesuai target

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa pelaksanaan program pembangunan daerah melalui sistem *e-Monev* menunjukkan capaian yang bervariasi antar perangkat daerah. Dinas Pertanian mencatat kinerja terbaik dengan realisasi fisik sebesar 95% dan keuangan 92% sehingga program berjalan sesuai target. Dinas Kesehatan juga menunjukkan progres yang cukup baik

⁴ Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, “Fasilitasi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024–2026,” <https://bappeda.sumselprov.go.id>, diakses 14 April 2026.

dengan capaian mendekati target, yaitu 90% fisik dan 88% keuangan, sehingga dikategorikan hampir selesai. Sementara itu, Dinas PUPR masih berada dalam tahap proses dengan capaian 85% fisik dan 80% keuangan, yang menunjukkan perlunya pengawasan lanjutan agar target dapat tercapai. Dinas Pendidikan memiliki capaian terendah dengan realisasi fisik 75% dan keuangan 70%, sehingga memerlukan percepatan pelaksanaan program.

Tabel 2. Fungsi *e-Monev* di Bappeda

Aspek	Fungsi <i>e-Monev</i>	Output
Perencanaan	Menyediakan data capaian kinerja sebelumnya	RKPD, RPJMD berbasis data
Pengendalian	Monitoring realisasi fisik dan keuangan	Laporan triwulan
Evaluasi	Analisis capaian program	Rekomendasi kebijakan
Data dan Informasi	Pengelolaan data pembangunan	<i>Dashboard</i> dan laporan kinerja

Berdasarkan Tabel 2, dapat dipahami bahwa *e-Monev* memiliki peran yang komprehensif dalam mendukung fungsi utama Bappeda, mulai dari perencanaan hingga pengelolaan data pembangunan. Pada aspek perencanaan, *e-Monev* menyediakan data capaian kinerja sebelumnya yang menjadi dasar dalam penyusunan dokumen seperti RKPD dan RPJMD berbasis data. Pada aspek pengendalian, sistem ini digunakan untuk memonitor realisasi fisik dan keuangan secara berkala sehingga menghasilkan laporan triwulan yang akurat. Selanjutnya, pada aspek evaluasi, *e-Monev* berfungsi untuk menganalisis capaian program yang kemudian menghasilkan rekomendasi kebijakan bagi perbaikan pembangunan. Sistem ini berperan dalam mengelola data pembangunan yang disajikan dalam bentuk *dashboard* dan laporan kinerja. *E-Monev* menjadi instrumen penting dalam menciptakan tata kelola pembangunan yang lebih terintegrasi dan berbasis data.

Selain itu, pemerintah daerah menekankan pentingnya pembangunan yang terintegrasi antar sektor dan perangkat daerah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sinkronisasi program pembangunan agar lebih efektif dan efisien. Integrasi tersebut memungkinkan adanya keselarasan antara perencanaan,

pelaksanaan, dan evaluasi program di berbagai bidang. Melalui koordinasi yang baik, setiap perangkat daerah dapat bekerja secara sinergis dalam mencapai tujuan pembangunan bersama. Selain itu, integrasi juga membantu menghindari terjadinya tumpang tindih program dan pemborosan anggaran.⁵

Implementasi *e-Monev* masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya integrasi sistem, serta kualitas data yang belum optimal. Keterbatasan kompetensi aparatur dalam mengoperasikan sistem berbasis digital menjadi hambatan dalam pemanfaatan *e-Monev* secara maksimal. Selain itu, belum terintegrasinya sistem antar perangkat daerah menyebabkan data yang dihasilkan belum sepenuhnya sinkron dan akurat. Permasalahan kualitas data juga muncul akibat kurangnya validasi dan konsistensi dalam proses penginputan. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya fungsi *monitoring* dan evaluasi dalam mendukung pengambilan keputusan. Diperlukan upaya perbaikan baik dari sisi teknis maupun sumber daya manusia, dengan mengatasi berbagai kendala tersebut, implementasi *e-Monev* diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan optimal.⁶

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini penting untuk mengkaji bagaimana implementasi *e-Monev* dalam mendukung perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah di Bappeda Provinsi Sumatera Selatan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran sistem *e-Monev* dalam meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasinya serta dapat dirumuskan upaya perbaikan yang lebih tepat dalam mengoptimalkan penggunaan sistem tersebut. Hasil kajian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan berbasis teknologi informasi di tingkat daerah. Tidak hanya itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi daerah lain dalam mengimplementasikan sistem serupa. Kajian ini mendukung

⁵ Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, “Pembangunan Harus Terintegrasi dan Berkelanjutan,” <https://sumselprov.go.id>, diakses 14 April 2026.

⁶ Ahmad Zaini, “Implementasi E-Government dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah”, *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 10, no. 2 (2020), hlm. 150.

terwujudnya pembangunan daerah yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi *e-Monev* dalam Perencanaan

Sistem *e-Monev* digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah karena mampu menyediakan data kinerja yang terintegrasi dan akurat. Data capaian kinerja yang diperoleh dari sistem ini menjadi bahan evaluasi dalam menentukan prioritas pembangunan yang lebih tepat sasaran. Melalui pemanfaatan data tersebut, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi program yang berhasil maupun yang memerlukan perbaikan. Selain itu, *e-Monev* juga membantu dalam memetakan kebutuhan pembangunan berdasarkan kondisi riil di lapangan. Proses perencanaan yang berbasis data ini mendorong terciptanya kebijakan yang lebih efektif dan efisien. Tidak hanya itu, penggunaan sistem *e-Monev* juga meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah menjadi lebih terarah, terukur, dan berorientasi pada hasil yang optimal.⁷

Perencanaan yang berbasis data *monitoring* akan meningkatkan efektivitas kebijakan karena didasarkan pada kondisi riil di lapangan. Data yang diperoleh dari proses *monitoring* memberikan gambaran yang akurat mengenai capaian program serta permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, penggunaan data *monitoring* juga membantu dalam meminimalkan kesalahan perencanaan yang bersifat spekulatif. Kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih terukur karena didukung oleh bukti empiris yang valid. Hal ini juga mendorong terciptanya efisiensi dalam penggunaan anggaran pembangunan. Pada akhirnya, perencanaan berbasis data *monitoring* mampu meningkatkan kualitas hasil pembangunan secara keseluruhan.⁸

⁷ Bappenas, *Panduan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan* (Jakarta: Bappenas, 2020), hlm. 56.

⁸ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 54.

Sejalan dengan konsep perencanaan pembangunan yang menekankan pentingnya *evidence-based policy*, setiap kebijakan yang disusun harus didasarkan pada data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan ini menuntut adanya penggunaan informasi yang valid dan relevan sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu menjawab permasalahan nyata di lapangan. Selain itu, *evidence-based policy* juga membantu pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan secara lebih objektif dan terukur. Proses ini memungkinkan evaluasi yang berkelanjutan terhadap efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Penggunaan data yang sistematis juga meningkatkan akuntabilitas pemerintah kepada publik. Pendekatan ini berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.⁹

2. Implementasi dalam Pengendalian

Pada aspek pengendalian, *e-Monev* berfungsi sebagai alat untuk memantau pelaksanaan program pembangunan secara berkala. Sistem ini memungkinkan pengawasan terhadap realisasi fisik dan keuangan kegiatan secara lebih sistematis dan terintegrasi. Melalui *e-Monev*, pemerintah daerah dapat mengetahui tingkat kemajuan program serta kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. Selain itu, sistem ini juga membantu dalam mendeteksi adanya deviasi atau keterlambatan pelaksanaan kegiatan sejak dini. Informasi yang dihasilkan menjadi dasar dalam pengambilan tindakan korektif agar program tetap berjalan sesuai target. Pengendalian yang dilakukan secara digital juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pembangunan, proses pengawasan menjadi lebih efektif, efisien, dan tepat waktu.¹⁰

Pengendalian yang efektif juga memerlukan koordinasi antar perangkat daerah agar program pembangunan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Koordinasi yang baik memungkinkan terjadinya sinkronisasi antara perencanaan dan

⁹ Riant Nugroho, *Public Policy* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 210.

¹⁰ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2018), hlm. 156.

pelaksanaan program di berbagai sektor. Dengan adanya komunikasi yang intensif, setiap perangkat daerah dapat memahami peran dan tanggung jawabnya masing-masing dalam mencapai tujuan pembangunan. Selain itu, koordinasi juga membantu dalam menghindari tumpang tindih program serta meminimalkan potensi konflik kebijakan. Melalui kerja sama yang terintegrasi, pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih efisien dan terarah. Hal ini juga mendukung optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Koordinasi yang efektif akan meningkatkan keberhasilan pencapaian target pembangunan daerah.¹¹

Adanya *e-Monev*, proses pengendalian menjadi lebih transparan dan akuntabel. Sistem ini memungkinkan setiap tahapan pelaksanaan program dapat dipantau secara terbuka dan terdokumentasi dengan baik. Informasi mengenai realisasi kegiatan dan penggunaan anggaran dapat diakses secara lebih mudah oleh pihak terkait. Hal ini mendorong peningkatan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Selain itu, transparansi yang dihasilkan dari *e-Monev* juga meminimalkan potensi penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan. Akuntabilitas meningkat karena setiap capaian dan kendala dapat dipertanggungjawabkan secara jelas, pengendalian pembangunan menjadi lebih efektif, profesional, dan berintegritas.¹²

3. Implementasi dalam Evaluasi

Evaluasi pembangunan dilakukan berdasarkan data yang dihimpun melalui sistem *e-Monev*. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan perbaikan kebijakan pembangunan ke depan. Data yang tersaji dalam sistem memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program, pemerintah daerah dapat melakukan analisis yang lebih objektif dan terukur terhadap kinerja pembangunan. Selain itu, evaluasi berbasis data memungkinkan identifikasi program yang perlu dilanjutkan,

¹¹ Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Gava Media, 2015), hlm. 73.

¹² Wahyudi Kumorotomo, *Akuntabilitas Birokrasi Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 91.

ditingkatkan, atau bahkan dihentikan. Proses ini juga mendukung pembelajaran kelembagaan dalam meningkatkan kualitas perencanaan di masa mendatang. Pada akhirnya, evaluasi yang sistematis melalui *e-Monev* berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan.¹³

Evaluasi yang sistematis akan meningkatkan kualitas pembangunan karena memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan program yang telah dilaksanakan. Melalui proses evaluasi yang terstruktur, setiap tahapan pelaksanaan program dapat dianalisis secara mendalam berdasarkan data yang akurat. Hal ini membantu pemerintah dalam mengetahui faktor-faktor yang mendukung keberhasilan maupun yang menghambat pencapaian target. Selain itu, evaluasi yang baik juga memberikan dasar yang kuat untuk melakukan perbaikan kebijakan secara berkelanjutan. Informasi yang dihasilkan menjadi acuan dalam menyusun strategi pembangunan yang lebih efektif di masa mendatang.¹⁴

4. Kendala Implementasi *e-Monev*

Meskipun memiliki berbagai keunggulan, implementasi *e-Monev* masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem secara optimal. Tidak semua aparatur memiliki kemampuan teknis yang memadai dalam penggunaan teknologi informasi, sehingga pemanfaatan *e-Monev* belum berjalan maksimal. Selain itu, kurangnya pelatihan dan pendampingan juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunaan sistem ini. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kesalahan dalam penginputan data maupun keterlambatan pelaporan. Dampaknya, kualitas data yang dihasilkan menjadi kurang akurat dan dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan, peningkatan kapasitas sumber daya

¹³ Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, “Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah,” Kementerian Dalam Negeri RI, 2020.

¹⁴ Taliziduhu Ndraha, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 112.

manusia menjadi hal yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan implementasi *e-Monev*.¹⁵

Selain itu, integrasi data antar perangkat daerah belum sepenuhnya optimal, sehingga menghambat efektivitas sistem. Setiap perangkat daerah sering kali menggunakan format dan mekanisme pelaporan yang berbeda, sehingga menyulitkan proses sinkronisasi data dalam *e-Monev*. Kondisi ini menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian atau duplikasi data yang dapat mengurangi akurasi informasi yang dihasilkan. Selain itu, keterlambatan dalam penginputan data dari masing-masing perangkat daerah juga menjadi kendala dalam memperoleh informasi yang *real time*. Kurangnya standar sistem yang terintegrasi turut memperburuk proses pengolahan data secara menyeluruh. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya fungsi *monitoring* dan evaluasi dalam mendukung pengambilan keputusan, diperlukan upaya penguatan integrasi sistem dan standarisasi data agar *e-Monev* dapat berjalan lebih efektif.¹⁶

Infrastruktur teknologi yang belum merata juga menjadi tantangan dalam implementasi *e-Monev*. Ketersediaan jaringan internet yang tidak stabil di beberapa wilayah menyebabkan proses penginputan dan pembaruan data menjadi terhambat. Selain itu, keterbatasan perangkat keras seperti komputer dan server juga mempengaruhi kelancaran operasional sistem. Kondisi ini berdampak pada tidak optimalnya pemanfaatan *e-Monev* di seluruh perangkat daerah. Perbedaan tingkat kesiapan teknologi antar instansi juga menimbulkan kesenjangan dalam pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi. Akibatnya, data yang dihasilkan menjadi tidak seragam dan kurang terintegrasi secara menyeluruh, diperlukan peningkatan infrastruktur teknologi secara merata guna mendukung efektivitas implementasi *e-Monev*.¹⁷

¹⁵ Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hlm. 67.

¹⁶ Agus Dwiyanto, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), hlm. 145.

¹⁷ Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, "Evaluasi Program Pembangunan Daerah," <https://sumsel.bps.go.id>, diakses 14 April 2026.

C. KESIMPULAN

Implementasi sistem *e-Monev* di Bappeda Provinsi Sumatera Selatan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Sistem ini mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan pembangunan secara menyeluruh. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, proses *monitoring* dan evaluasi dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan terintegrasi. Selain itu, *e-Monev* juga mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih akurat dan responsif terhadap kebutuhan daerah. Sistem ini memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi capaian kinerja serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembangunan. Perbaikan kebijakan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Implementasi *e-Monev* berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan pembangunan daerah yang lebih optimal.

Masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya, terutama terkait sumber daya manusia, integrasi sistem, dan infrastruktur teknologi. Keterbatasan kompetensi aparatur dalam mengoperasikan sistem digital menjadi salah satu hambatan utama dalam optimalisasi *e-Monev*. Selain itu, belum terintegrasinya data antar perangkat daerah menyebabkan informasi yang dihasilkan kurang maksimal dan tidak sepenuhnya sinkron. Infrastruktur teknologi yang belum merata juga memperlambat proses pengelolaan dan pertukaran data secara *real time*, diperlukan upaya peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan. Penguatan sistem informasi yang terintegrasi juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas data dan koordinasi antar instansi. Melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi, diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda Provinsi Sumatera Selatan. (2026). Diakses dari <https://bappeda.sumselprov.go.id>
- Bappenas. (2020). *Panduan Monitoring dan Evaluasi pembangunan*.
- BPS Provinsi Sumatera Selatan. (2026). Diakses dari <https://sumsel.bps.go.id>
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis*. Routledge.
- Dwiyanto, A. (2017). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Indrajit, R. E. (2016). *Electronic Government*. Andi.
- Kumorotomo, W. (2013). *Akuntabilitas Birokrasi Publik*. Pustaka Pelajar.
- Kuncoro, M. (2014). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Teori dan Aplikasi*. Erlangga.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Ndraha, T. (2015). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Rineka Cipta.
- Nugroho, R. (2018). *Public Policy*. Elex Media Komputindo.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. (2026). Diakses dari <https://sumselprov.go.id>
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik*. Gava Media.
- Sinambela, L. P. (2017). *Reformasi Pelayanan Publik*. Bumi Aksara.
- Subarsono. (2018). *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar.
- Zaini, A. (2020). Implementasi e-government dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 150–160.